



# TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

---

## KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR (WAJAR DIKNAS 9 TAHUN) DI KECAMATAN LEUWIDAMAR

Alsri Nurcahya<sup>1</sup>, Ahmad Qurtubi<sup>2</sup>, Anis Fauzi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: 232625226.alsri@uinbanten.ac.id

### ABSTRAK

Kebijakan Pendidikan Dasar, khususnya Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Leuwidamar, merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan untuk masyarakat. Tujuan utama mewajibkan anak-anak untuk mengenyam pendidikan minimal selama 9 Tahun, yaitu memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak, meningkatkan akses pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, dan memperbaiki kualitas pendidikan. Implementasi kebijakan ini diharapkan memberikan dampak yang baik dalam mengurangi tingkat putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan pada tingkat dasar. Akan tetapi, banyak tantangan dalam memastikan keberlanjutan program ini, seperti infrastruktur yang memadai, ketersediaan tenaga pendidikan berkualitas, serta pemenuhan kebutuhan siswa dengan beragam latar pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu field research, dengan cara menghimpun data atau informasi yang relevan, dan mengkaji topik atau masalah terkait perkembangan Kebijakan Pendidikan Dasar Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Leuwidamar. Hasil dari penelitian menunjukkan belum meratanya program ini terlaksana, dikarenakan oleh faktor ekonomi, aksesibilitas, dan kurangnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam evaluasi dan penyesuaian kebijakan ini agar dapat mencapai tujuan utama pendidikan dasar yang merata dan berkualitas.

**Kata kunci** : Kebijakan Pendidikan Dasar, Wajib Belajar 9 Tahun

### ABSTRACT

*The basic education policy, in particular the 9-year compulsory education program in Leuwidamar district, is a government effort to improve the accessibility and quality of education for the public. The primary objective is to require children to complete minimum education for nine years, i.e., to provide equal opportunities for all children to obtain adequate basic education, improve access to education, reduce school dropouts, and improve the quality of education. Implementation of this policy is expected to have a good impact on reducing the drop-out rate and increasing participation in education at the*



# TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

---

*primary level. However, there are many challenges in ensuring the sustainability of the program, such as adequate infrastructure, the availability of quality educational resources, and meeting the needs of students with diverse educational backgrounds. The method used in this research is field research, which involves gathering relevant data or information and studying topics or issues related to the development of the Basic Education Policy of the 9-Year Compulsory Study Program in Leuwidamar district. The results of the study indicate that the program has not been fully implemented, owing to economic factors, accessibility, and a lack of motivation to pursue education. Therefore, efforts are needed in the evaluation and adjustment of this policy in order to achieve the primary objective of equal and quality basic education.*

**Keywords:** *Basic Education Policy, Compulsory Nine-Year Education*

## PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi salah satu aspek utama dalam pembangunan. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar telah menjadi fokus utama pemerintah. Seiring dengan tuntutan global akan peningkatan literasi dan keterampilan, serta mencapai berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dalam sektor pendidikan. Pada awalnya, program belajar hanya mencakup tingkat pendidikan dasar yang terdiri dari 6 Tahun. Namun, kesadaran akan pentingnya pendidikan yang lebih lanjut untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan mendorong pemerintah untuk memperpanjang masa wajib belajar menjadi 9 Tahun.

Pendidikan dasar merupakan fondasi yang krusial dalam pembentukan karakter, peningkatan pengetahuan, dan pemberdayaan individu. Di Indonesia, perjalanan menuju penyediaan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas telah melalui berbagai tahap dan perubahan. Salah satu tonggak penting dalam upaya tersebut adalah kebijakan wajib belajar 9 Tahun. Dalam konteks global, Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sejalan dengan agenda internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Salah satu langkah konkret dalam upaya tersebut adalah melalui implementasi kebijakan wajib belajar 9 Tahun di Kecamatan Leuwidamar. Kebijakan ini tidak hanya menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi pendidikan dasar yang merata, tetapi juga membuka pintu bagi peluang yang lebih luas bagi generasi muda. Hal ini memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan



## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

---

yang setara bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak, meningkatkan akses pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, dan memperbaiki kualitas pendidikan.

Selain itu, akan juga dikaji gambaran umum mengenai Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun dan sejarahnya, tujuan-tujuan yang ingin dicapai, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, dampak yang diharapkan dari kebijakan ini terhadap kualitas hidup masyarakat, serta kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Melalui pemahaman yang mendalam tentang Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun, diharapkan dapat lebih memperkuat kesadaran akan pentingnya pendidikan dasar sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa, serta menarik perhatian dalam upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk menjadikannya lebih efektif dan inklusif.

Kajian literatur yang membahas mengenai Kebijakan Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun) telah banyak dilakukan, diantaranya: Tambunan, 2020. Mengkaji tentang partisipasi pemuda dalam meningkatkan program belajar sembilan tahun bagi masyarakat, dengan hasil kajiannya adalah adanya kendala dalam hal pendanaan saat menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun ini. Maka, dengan adanya partisipasi pemuda dalam hal ini, memberikan semangat baru untuk menjembatani hal tersebut, seperti mencari donator untuk anak-anak yang kurang mampu, serta beasiswa pendidikan<sup>1</sup>. Kajian literatur berikutnya, Maulida Hardiasanti, 2021. Mengkaji mengenai implementasi wajib belajar di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Hasil dari kajian literatur ini yaitu adanya keberhasilan dalam mewujudkan wajib belajar 9 Tahun di daerah 3T, dengan wujud pembangunan sekolah, pemberian beasiswa, hingga memperbaiki akses pendidikan di daerah<sup>2</sup>.

Mahmud Hidayat, 2023. Mengkaji tentang Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun, yang bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Adapun hasil dari kajian ini adalah penemuan saran mengenai proses sosialisasi program ini diharapkan lebih konsisten lagi, serta sosialisai

---

<sup>1</sup> Ahmad Taufiq Tambunan, Erika Revida, and Rujiman Rujiman, "Partisipasi Pemuda Dalam Meningkatkan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Bagi Masyarakat Kelurahan Denai Kota Medan," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 8, no. 1 (2020): 39.

<sup>2</sup> Maulidia Hardiasanti and Syunu Trihantoyo, "Implementasi Wajib Belajar Di Daerah Terdepan, Terluar Dan Tertinggal," *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* 09, no. 05 (2021): 1064–1077.



# TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

---

pemahaman mengenai budaya pernikahan dini secara masif dan intensif<sup>3</sup>. Dwi Wulan Sari, 2023. Mengkaji mengenai pendidikan untuk semua: Wajib Belajar 9 Tahun, dengan hasil perlu adanya perbaikan segi pendanaan dari pemerintah setempat, guna kualitas pendidikan menjadi lebih baik<sup>4</sup>. Rupinus, 2023. Melakukan kajian tentang implementasi kebijakan wajib belajar 9 Tahun. Hasil dari kajiannya menunjukkan beberapa faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun, diantaranya: faktor sosial, faktor geografis, akses teknologi, serta kebijakan pendidikan yang belum merata, yang mana hal ini perlu dijadikan evaluasi agar penerapan kebijakan ini berjalan secara utuh<sup>5</sup>.

Berdasarkan kajian literatur di atas terdapat beberapa fokus kajian yang bisa dilakukan, diantaranya tujuan dari diadakannya program wajib belajar Sembilan tahun bagi masyarakat, hingga dampak dari implementasi program tersebut. Diperlukan juga kebaruan (*Novelty*) dari implementasi program ini, agar kajian mengenai penerapan program wajib belajar 9 Tahun, dapat menambah khazanah keilmuan. Harapannya, kajian ini dapat menjadi hal baik, dalam proses implementasinya terhadap perkembangan proses pendidikan yang merata dan berkualitas.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan pendekatan Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu pendekatan dengan cara mengumpulkan data, dan literatur dari berbagai sumber<sup>6</sup>. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi<sup>7</sup>. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menganalisa teori berdasarkan dengan

---

<sup>3</sup> Retno Wulan Sekarsari Mahmud Hidayat, Khoiron, "EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR WAJIB BELAJAR 9 TAHUN STUDI KASUS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG" 17, no. 8 (2023): 47–57.

<sup>4</sup> Dwi Wulan Sari and Qolbi Khoiri, "Pendidikan Untuk Semua: Studi Pada Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun," *Journal on Education* 5, no. 3 (2023): 9441–9450.

<sup>5</sup> Tora Akadira Rupinus, Arifin, "VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN" 14 (2023): 301–310.

<sup>6</sup> A S Sukmawati et al., *BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=vrrEAAAQBAJ>.

<sup>7</sup> Wahyudin Dermalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020): 1–6.



# TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

---

teks dan mengkaitkannya dengan literatur-literatur yang diamati<sup>8</sup>, sehingga memungkinkan pemahaman yang disesuaikan dengan fokus penelitian berikut: (1) Mengkaji latar belakang Program Wajib Belajar 9 Tahun; (2) Mengetahui apa saja tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam proses implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun; (3) Menganalisis bentuk-bentuk Program Wajib Belajar 9 Tahun; (4) Mengkaji dampak yang terjadi dari kebijakan penerapan Program Wajib Belajar 9 Tahun (5) Serta hasil analisa penelitian implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Perkembangan Program Wajib Belajar

#### a) Sejarah perkembangan program wajib belajar 6 tahun

1. Era Kolonial (Abad ke 15)  
Sebelum kemerdekaan Indonesia, akses pendidikan terbatas dan tidak merata. Pendidikan dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan fokus pada pendidikan bagi golongan tertentu, seperti priyai (bangsawan) dan orang-orang terpilih.
2. Pendidikan Pasca Kemerdekaan  
Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mengakui pentingnya pendidikan sebagai sarana pembangunan bangsa yang baru merdeka. Meskipun kondisi ekonomi dan politik masih sulit, pemerintah berupaya untuk menyediakan pendidikan yang layak<sup>9</sup>.
3. Perkembangan Awal Program Wajib Belajar  
Pada tahun 1947, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pokok Pendidikan yang mewajibkan anak-anak untuk mengikuti pendidikan dasar selama 4 Tahun. Namun, implementasinya masih terbatas dan tidak merata<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> I.M.L.M. Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*, Anak Hebat Indonesia (Anak Hebat Indonesia, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=yz8KEAAAQBAJ>.

<sup>9</sup> Tambunan, Revida, and Rujiman, "Partisipasi Pemuda Dalam Meningkatkan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Bagi Masyarakat Kelurahan Denai Kota Medan."

<sup>10</sup> Rikmanen Zidane, Rahmat Hidayat, and Rudyk Nababan, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KABUPATEN BOGOR (Studi Kasus Kecamatan



## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

---

4. Perpanjangan Masa Wajib Belajar  
Pada tahun 1961, pemerintah memperpanjang masa wajib belajar menjadi 6 Tahun, melalui Undang-Undang No.4 Tahun 1961. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dan terdidik untuk mendukung pembangunan nasional<sup>11</sup>.
5. Implementasi Program Wajib Belajar 6 Tahun  
Pemerintah mulai mengimplementasikan program ini secara lebih luas. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan<sup>12</sup>.
6. Perkembangan selama Era Orde Baru (1966-1998)  
Pemerintah mengintensifkan upaya dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar. Berbagai program dan proyek pembangunan infrastruktur pendidikan dilakukan untuk mendukung program ini<sup>13</sup>.

### b) Sejarah perkembangan program wajib belajar 9 tahun

1. Perpanjangan Masa Wajib Belajar  
Pada tahun 1973, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1973 yang berisikan memperpanjang masa wajib belajar 9 tahun, hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas dan komprehensif.
2. Perkembangan Implementasi  
Implementasi program ini tidak langsung berjalan dengan baik. Terdapat berbagai tantangan dalam menjalankan program ini termasuk

---

Cibinong Dan Kecamatan Sukamakmur),” *JIAIP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 9, no. 1 (2021): 37–47.

<sup>11</sup> Zainal Abidin, Tobibatussa’adah, and Abdul Mujib, “Praktek Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Pada,” *Ri’Ayah* 7, no. 02 (2022): 188–212, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/5836/2962>.

<sup>12</sup> Ade Millatus Sa’adiyyah and Siti Kulsom, “Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Dalam Mengimplementasikan Program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun Untuk Memenuhi Hak Belajar Anak,” *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 4, no. 1 (2021): 20–33.

<sup>13</sup> Fatkhul Mubin, “Perencanaan Penuntasan Wajib Belajar Dan Peningkatan Mutu Pendidikan” 3 (2020): 268–279.



# TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

---

masalah infrastruktur, ketersediaan fasilitas pendidikan, serta akses pendidikan di daerah terpencil dan pedalaman<sup>14</sup>.

### 3. Penguatan Kebijakan

Selama Orde Baru (1966-1998) pemerintah menguatkan kebijakan program ini dengan melakukan pembangunan infrastruktur pendidikan, pembinaan tenaga pendidik, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

### 4. Penguatan Implementasi di Era Reformasi

Pasca-Reformasi pada Tahun 1998, pemerintah mengalihkan fokusnya untuk memperkuat implementasi program ini. Hal ini termasuk dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi disparitas antar wilayah, serta memperbaiki aksesibilitas pendidikan<sup>15</sup>.

### 5. Perkembangan Teknologi dan Pendidikan

Perkembangan teknologi, khususnya internet, juga memengaruhi implementasi program ini. Pemerintah berupaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan<sup>16</sup>

## c) Sejarah perkembangan program wajib belajar 12 tahun

Wacana tentang perpanjangan masa wajib belajar 12 tahun kerap kali menjadi pembahasan global<sup>17</sup>. Pemikiran ini muncul dari kesadaran akan pentingnya pendidikan yang lebih menyeluruh. Seiring dengan perkembangan zaman, pembahasan ini semakin intensif dibahas oleh berbagai pihak untuk merumuskan konsep dan strategi implementasi program ini<sup>18</sup>. Proses ini melibatkan berbagai kementerian, lembaga

---

<sup>14</sup> Ahmad Taufiq Tambunan, Erika Revida, and Rujiman Rujiman, "Partisipasi Pemuda Dalam Meningkatkan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Bagi Masyarakat Kelurahan Denai Kota Medan," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 8, no. 1 (2020): 39–63.

<sup>15</sup> Rupinus, Arifin, "VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN."

<sup>16</sup> Mahmud Hidayat, Khoiron, "EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR WAJIB BELAJAR 9 TAHUN STUDI KASUS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG."

<sup>17</sup> Iis Margiyanti and Siti Tiara Maulia, "Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun," *Jurnal Pendidikan dan Sastra Inggris* 3, no. 1 (2023): 199–208.

<sup>18</sup> Andri Wicaksono and Yulia Siska, "Wajib Belajar 12 Tahun Rekomendasi Kebijakan Menengah Universal (PMU)," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang* (2020): 846, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1628534&val=12987&title=WAJIB>



# TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

---

terkait, serta *stake holder* lainnya untuk merumuskan kerangka kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan<sup>19</sup>.

Dasar yang melatarbelakangi hal ini adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, dan Peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. UU ini mencakup prinsip-prinsip yang mendasari perpanjangan wajib belajar termasuk standar kompetensi lulusan yang dapat mencakup pendidikan hingga tingkat Menengah Atas (SMA)<sup>20</sup>.

Sebelum program ini diterapkan secara menyeluruh, beberapa instansi pendidikan telah melakukan percobaan untuk mengevaluasi efektivitas dan kendala-kendala yang timbul, serta menyiapkan infrastruktur dan sumber daya yang dibutuhkan<sup>21</sup>. Setelah melalui tahap evaluasi, program ini dijalankan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesetaraan, memperkuat infrastruktur pendidikan, dan meningkatkan kualitas SDM agar memberikan dampak yang baik bagi perkembangan pendidikan<sup>22</sup>. Evaluasi ini juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan jika diperlukan.

## Latar Belakang Program Wajib Belajar 9 Tahun

Program wajib belajar 9 Tahun adalah sebuah kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk memastikan setiap anak di Indonesia mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan berkualitas. Adapun hal yang melatarbelakangi program ini meliputi beberapa hal, seperti tingkat pendidikan yang rendah<sup>23</sup>. Sebelum

---

BELAJAR 12 TAHUN REKOMENDASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL PMU.

<sup>19</sup> Fitri Silvia Sofyan and Aris Riswandi Sanusi, "Pentingnya Wajar Dikdas 12 Tahun Untuk Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2022," *Jurnal UBP Karawang* (2023): 2411–2420.

<sup>20</sup> Fismanelly Fismanelly, Herman Herman, and Syahril Syahril, "Efektivitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Permata Bunda Sebagai Lembaga Pendidikan Nonformal Dalam Upaya Pengentasan Wajib Belajar Sembilan Tahun," *Tarikhuna: Journal of History and History Education* 4, no. 1 (2022): 91–103.

<sup>21</sup> M.Makhrus Ali et al., "Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapannya Dalam Penelitian," *Education Journal* 2, no. 2 (2022): 1–6.

<sup>22</sup> Bashori Bashori and Septi Gia Aprima, "Analisis Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi Lampung," *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2019): 18–28.

<sup>23</sup> Bayu Kharisma Adhitya Wardhana, "Pendidikan, Dimana Program Pendidikan Yang Dijadikan Salah Satu Prioritas Di Indonesia Adalah Berdasarkan Jenjang Pendidikan. Apabila Melihat



## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

---

diberlakukannya program ini, angka melek huruf di Indonesia masih tergolong rendah, terutama di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang masih banyak tidak mendapatkan kesempatan untuk sekolah karena berbagai faktor, termasuk keterbatasan ekonomi, dan aksesibilitas<sup>24</sup>.

Kemudian dengan adanya tujuan pembangunan nasional, pendidikan dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu negara. Diharapkan dengan meningkatkan akses pendidikan di masyarakat, dapat pula menaikkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi modal utama dalam menghadapi persaingan global<sup>25</sup>. Selanjutnya adanya kesetaraan pendidikan, yang mana kebijakan ini bertujuan untuk menjamin kesetaraan dalam pendidikan bagi semua anak-anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis mereka<sup>26</sup>.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, tidak luput dari hal yang melatarbelakangi adanya program tersebut. Hal ini dapat memperpanjang masa wajib belajar menjadi 9 Tahun, yang mana diharapkan akan menjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia secara keseluruhan, dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan<sup>27</sup>. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah di Indonesia, juga terciptanya lingkungan yang lebih kondusif bagi para peserta didik untuk menyelesaikan pendidikan dasar mereka<sup>28</sup>. Pendidikan dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan, dengan memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga

---

Perkembangan Tamatan Pendidikan Usia 15 Tahun Ke Belajar Umumnya Belum Mampu Untuk Dipenuhi Oleh Beberapa Provi” 12, no. 04 (2023): 742–751.

<sup>24</sup> Sandi Ciptullah, Valda Putri Loppies, and Wildan Pratama Putra, “Pengaruh Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Terhadap Pendapatan Di Pulau Jawa” (2022).

<sup>25</sup> Ade Sofa, Iga Mawarni, and Asra’i Maros, “Implementasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Bagi Suku Anak Dalam,” *Administratus* 7, no. 1 (2023): 31–42.

<sup>26</sup> A A Ilyas, “Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mewujudkan Wajib Belajar 9 Tahun (Studi Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka),” *Jambura Journal of Administration and Public Service* 3, no. April (2023), <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjaps/article/download/19441/6364>.

<sup>27</sup> Marthen Tabun, “Analisis Kebijakan Tentang Sd-Smp Negeri Satu Atap Dan Aplikasinya Dalam Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Kupang,” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 6, no. 4 (2023): 3152–3159, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/22549>.

<sup>28</sup> Nadila Putri Paradiba et al., “Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Sosialisasi Wajib Belajar 9 Tahun,” *Karimah Tauhid* 2, no. 5 (2023): 1959–1966, <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/10545>.



# TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

---

kurang mampu<sup>29</sup>. Demikian pemerintah Indonesia menerapkan Program Wajib Belajar 9 Tahun sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, kesetaraan, dan kualitas pendidikan dasar di Indonesia.

## Bentuk Program Wajib Belajar 9 Tahun

Program Wajib Belajar 9 Tahun (WBBM) memiliki berbagai bentuk dan komponen yang dirancang untuk memastikan setiap anak di Indonesia mendapatkan akses pendidikan dasar yang layak dan berkualitas, diantaranya:

1. Kebijakan Wajib Belajar: Kebijakan ini menetapkan bahwa setiap anak di Indonesia wajib mengikuti pendidikan selama 9 Tahun, mulai dari tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Ini merupakan dasar hukum yang mengatur tentang kewajiban pendidikan bagi setiap anak.
2. Aksesibilitas Pendidikan: Salah satu tujuan utama program WBBM adalah meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi semua anak. Ini termasuk pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas sekolah, dan peningkatan akses transportasi menuju sekolah<sup>30</sup>.
3. Pemberian Beasiswa dan Bantuan Keuangan: Pemerintah menyediakan jenis bantuan keuangan, seperti beasiswa atau dana bantuan pendidikan bagi warga yang kurang mampu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa biaya pendidikan tidak menjadi hambatan bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan<sup>31</sup>.
4. Program Kelas Tambahan dan Remedial: Guna membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar, beberapa sekolah menyelenggarakan program kelas tambahan atau remedial. Program ini memberikan bantuan tambahan dalam memahami materi dan meningkatkan prestasi akademik siswa.

---

<sup>29</sup> Wajib Belajar Tahun and Mahmud Hidayat, "EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR WAJIB BELAJAR 9 TAHUN Studi" (2023).

<sup>30</sup> Meysi Christi Rolos, Johny H. Posumah, and Very Y. Londa, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Minahasa Tenggara," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* VIII, no. 113 (2022): 1–11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/38156/34866>.

<sup>31</sup> Abdul Razak and Satria Wiguna, "Pengaruh Beasiswa Pendidikan Pada Program Indonesia Pintar (PIP) Terhadap Minat Belajar Aqidah Akhlak," *Tut Wuri Handayani : Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 3 (2023): 103–108.



## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

---

5. Pendidikan Inklusif: Program WBBM juga mengadvokasikan pendidikan inklusif bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus atau disabilitas. Sekolah-sekolah diharapkan dapat menyediakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya<sup>32</sup>.
6. Pelatihan Guru: Peningkatan kualitas Guru juga merupakan bagian integral program WBBM. Pemerintah menyelenggarakan program dan pengembangan profesional bagi guru agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa<sup>33</sup>
7. Kurikulum yang Relevan: Penyusunan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman juga menjadi bagian dari program ini. Kurikulum disusun dan dievaluasi dengan memerhatikan perkembangan teknologi, nilai-nilai budaya, dan kebutuhan siswa sesuai zaman.
8. Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program WBBM untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran program tercapai dengan baik. Evaluasi ini juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan jika diperlukan<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Atun Lestari, Farid Setiawan, and Eviana Agustin, "Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar," *Arzusin* 2, no. 6 (2022): 602–610.

<sup>33</sup> D Dariyanto, S Suharjuddin, and A W Awiria, "Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pedagogik Guru Melalui Penelitian Tindakan Kelas Di SDN Teluk Pucung I Kota Bekasi," *Jurnal IPMAS* 1, no. 2 (2021): 59–66, [http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/11761%0Ahttp://repository.ubharajaya.ac.id/11761/1/JURNAL ABDIMAS PTK JIPMAS 2021 %281%29.pdf](http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/11761%0Ahttp://repository.ubharajaya.ac.id/11761/1/JURNAL%20ABDIMAS%20PTK%20JIPMAS%202021%20%281%29.pdf).

<sup>34</sup> Evi Catur Sari, "Kurikulum Di Indonesia: Tinjauan Perkembangan Kurikulum Pendidikan," *Inculco Journal of Christian Education* 2, no. 2 (2022): 93–109.



# TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

---

## Tujuan Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun

Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun memiliki berbagai tujuan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dasar di Indonesia. Diantaranya:

1. Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan: Memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dasar yang berkualitas tanpa memandang latar belakang ekonomi, geografis, atau sosialnya. Dengan meningkatkan aksesibilitas pendidikan, diharapkan lebih banyak anak yang dapat mengikuti pendidikan secara penuh.
2. Menurunkan Angka Putus Sekolah: Pemerintah bertujuan untuk menurunkan angka putus sekolah di Indonesia. Melalui penetapan kewajiban untuk mengikuti Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun, diharapkan anak-anak akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan pendidikan dasar mereka hingga tingkat yang ditetapkan<sup>35</sup>.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan: Hal ini meliputi peningkatan kualitas guru, pembaharuan kurikulum, penggunaan metode pengajaran yang inovatif, dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
4. Mendorong Pendidikan Inklusif: Memastikan bahwa setiap sekolah menyediakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan anak-anak dengan berbagai kemampuan dan dukungan yang diperlukan.
5. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas: Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk menghadapi tantangan masa depan. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang baik di tingkat dasar diharapkan akan memiliki landasan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja<sup>36</sup>.
6. Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial: Diberikannya akses pendidikan yang lebih luas kepada anak-anak dari berbagai lapisan

---

<sup>35</sup> Lidia Napida et al., "Perkembangan Pendidikan Di Belanda," *Jurnal Yudistira: Publikasi Riset Ilmu Pendidikan dan Bahasa* 2, no. 1 (2024): 20–27.

<sup>36</sup> Irwan Lukman, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Ternate Dalam Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun," *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8, no. 4 (2019): 339–345.



## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

---

masyarakat, program ini diharapkan dapat membuka peluang yang lebih besar bagi mereka untuk meraih kesuksesan dan kesejahteraan.

7. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan: Hal ini melibatkan orangtua, komunitas lokal, dan berbagai pihak terkait lainnya, diharapkan akan tercipta lingkungan pendidikan yang lebih kondusif, dan mendukung bagi perkembangan anak-anak<sup>37</sup>.

### **Dampak Kebijakan Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun**

Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun (WBBM) memiliki dampak yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan di Indonesia. Beberapa dampak yang ditimbulkan tentu tidak terlepas dari dampak positif dan juga dampak negatif. Salah satu dampak utama dari implementasi program tersebut adalah meningkatnya akses pendidikan bagi anak-anak, yang mana hal ini memberikan kesempatan lebih besar bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak<sup>38</sup>. WBBM juga memiliki dampak positif dalam menurunkan angka putus sekolah, dengan mewajibkan anak-anak untuk mengikuti pendidikan selama 9 Tahun, memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyelesaikan pendidikan dasar hingga tingkat yang telah ditetapkan<sup>39</sup>.

Implementasi program ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dengan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan dasar yang layak, program ini menciptakan pondasi yang kuat bagi pembangunan sumber daya yang berkualitas di masa yang akan datang. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan, dengan memberikan anak-anak kesempatan untuk

---

<sup>37</sup> Sigit Wahyudi, "Peranan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dalam Upaya Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun Di Mts Nw Teros Tahun Anggaran 2019/2020," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7 (2021): 1–21.

<sup>38</sup> R Berliana and R D A Putra, "Pengaruh Wajib Belajar Sembilan Tahun Terhadap Pendapatan: Studi Kasus Indonesia," *HIMIE Economics Research and ...* (2022), <https://prosiding.umy.ac.id/hero/index.php/hero/article/download/9/8>.

<sup>39</sup> Zidane, Hidayat, and Nababan, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KABUPATEN BOGOR (Studi Kasus Kecamatan Cibinong Dan Kecamatan Sukamakmur)."



## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

---

memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka<sup>40</sup>.

Program Wajib Belajar 9 Tahun juga dapat mendorong pembangunan ekonomi dengan cara menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan dasar yang baik, memiliki peluang yang lebih besar untuk tantangan di masa yang akan datang dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara<sup>41</sup>. Selain itu juga berkontribusi pada peningkatan kesetaraan gender dalam pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan adalah hak bagi semua anak, tanpa memandang gender, dan membuka kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Juga, dapat memperkuat pembangunan sosial dan budaya di Indonesia<sup>42</sup>. Melalui pendidikan, anak-anak dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas tentang budaya sendiri dan budaya-budaya lainnya, serta mempromosikan toleransi dan pemahaman antar budaya.

Walaupun demikian, terdapat pula dampak kurang baik yang dapat timbul terkait kebijakan ini, diantaranya, terdapat tingkat kelulusan yang rendah, pengangguran dan *underemployment*, kesenjangan pendidikan, tingkat keterampilan yang kurang memadai, serta tingkat pendidikan yang tidak optimal<sup>43</sup>. Meskipun diwajibkan untuk bersekolah, beberapa siswa tidak menutup kemungkinan tetap mengalami kesulitan. Hal ini bisa disebabkan oleh tantangan pribadi, kurangnya dukungan keluarga, atau masalah akademik tertentu. Peserta didik yang tidak memiliki akses ke pendidikan yang lebih tinggi atau pelatihan keterampilan tambahan, kemungkinan menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak<sup>44</sup>.

---

<sup>40</sup> Napida et al., "Perkembangan Pendidikan Di Belanda."

<sup>41</sup> M.Ag Dr. Umar Sidiq, *Kebijakan Program Wajib Belajar*, n.d.

<sup>42</sup> Elvima Nofrianni Arisman Sabir, Aldino, "Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun Di Desa Desa Datar Kecamatan Muko-Muko Bathin Vii," *Ilmiah, Jurnal Pendidikan, Wahana 9*, no. 20 (2023): 409–416.

<sup>43</sup> Anda Nugroho et al., "Poverty Eradication Programs in Indonesia: Progress, Challenges and Reforms," *Journal of Policy Modeling* 43, no. 6 (2021): 1204–1224, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161893821000661>.

<sup>44</sup> Amanda Beatty et al., "Schooling Progress, Learning Reversal: Indonesia's Learning Profiles between 2000 and 2014," *International Journal of Educational Development* 85 (2021): 102436, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059321000894>.



## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

---

Program ini juga dapat memperkuat kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Faktor yang menjadi pembeda dalam hal ini seperti kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai, kualitas guru yang bervariasi, hingga kurangnya sumber daya di daerah-daerah tertentu<sup>45</sup>. Tingkat keterampilan yang dimiliki, belum cukup untuk bersaing di era yang semakin kompetitif. Kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik, atau kurangnya fokus pada pengembangan keterampilan praktis, dapat menjadi penyebab tidak efektifnya dari implementasi program ini<sup>46</sup>.

Program wajib belajar 9 tahun, tidak selalu menciptakan peningkatan signifikan dalam kualitas pendidikan. Banyak faktor yang dapat menghambat seperti kualitas pengajar, kurikulum yang relevan, dan dukungan siswa yang personal, juga perlu dipertimbangan untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal<sup>47</sup>. Mengatasi dampak-dampak yang kurang baik ini, perlu adanya evaluasi yang konsisten terhadap program wajib belajar 9 tahun, serta upaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan secara menyeluruh.

---

<sup>45</sup> Mitsuhiro Kataoka, "Interprovincial Differences in Labour Force Distribution and Utilization Based on Educational Attainment in Indonesia, 2002–2015," *Regional Science Policy & Practice* 11, no. 1 (2019): 39–55, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1757780223003360>.

<sup>46</sup> Alice Yuen Loke, Chunlan Guo, and Alex Molassiotis, "Development of Disaster Nursing Education and Training Programs in the Past 20 Years (2000–2019): A Systematic Review," *Nurse Education Today* 99 (2021): 104809, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691721000666>.

<sup>47</sup> Blane D Lewis and Hieu T M Nguyen, "Assessing the Causal Impact of Compulsory Schooling Policy in Indonesia," *International Journal of Educational Research* 104 (2020): 101693, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035520317997>.



## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

### Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Leuwidamar

Tabel 1. Panduan umum melaksanakan Program Wajib Belajar 9 Tahun

<b>Bentuk Program</b>	<b>Implementasi</b>
<b>Perencanaan</b>	Bentuk tim atau kelompok yang terdiri dari para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, sekolah, orangtua/wali murid, serta tokoh masyarakat setempat. Tujuannya untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan khusus kecamatan dalam implementasi program tersebut.
<b>Pengorganisasian</b>	Membentuk struktur organisasi yang jelas dan koordinasi yang efektif antara semua pihak terlibat.
<b>Penyuluhan dan Sosialisasi</b>	Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada orangtua/wali murid, tentang pentingnya pendidikan dan kewajiban 9 Tahun. Sosialisasi menggunakan berbagai media komunikasi seperti komunitas, spanduk, brosur, dan media sosial
<b>Pemetaan Siswa</b>	Melakukan pemetaan siswa di Kecamatan Leuwidamar untuk mengetahui jumlah yang belum memenuhi kewajiban belajar 9 Tahun dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut
<b>Intervensi</b>	Menyesuaikan program intervensi dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam pemetaan siswa. Program ini berupa bantuan beasiswa, pelatihan keterampilan bagi siswa yang putus sekolah, atau program khusus bagi siswa dengan kebutuhan khusus.
<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	Bentuk sistem monitoring yang teratur untuk memantau kemajuan implementasi program. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas program dan membuat perbaikan.



## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

---

<b>Kolaborasi</b>	Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Pendidikan, perusahaan, lembaga swadaya untuk mendukung pelaksanaan program wajib belajar 9 Tahun.
<b>Penghargaan</b>	Memberikan penghargaan kepada siswa yang berhasil menyelesaikan kewajiban belajar 9 Tahun dengan baik untuk menambah memotivasi bagi siswa lainnya.

### **Hasil Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Leuwidamar**

Salah satu hasil yang diharapkan dari implementasi program ini adalah peningkatan partisipasi siswa dalam pendidikan. Jika program ini berjalan dengan baik, maka dapat diharapkan lebih banyak siswa yang melanjutkan pendidikan mereka hingga tingkat yang diwajibkan. Melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang intensif, diharapkan masyarakat di Kecamatan Leuwidamar leboh sadar akan pendidikan dan kewajiban belajar 9 Tahun. Ini dapat tercermin dalam peningkatan dukungan orangtua/wali murid terhadap pendidikan anak-anak mereka.

Program ini juga bertujuan mengurangi angka putus sekolah dengan memberikan bantuan dan intervensi yang tepat kepada siswa yang beresiko tinggi putus sekolah. Dengan memastikan lebih banyak siswa yang menyelesaikan kewajiban belajarnya, diharapkan juga terjadi peningkatan secara keseluruhan dalam kualitas pendidikan di Kecamatan Leuwidamar. Namun demikian implementasi program ini belum merata, terdapat beberapa ketimpangan dari beberapa faktor seperti faktor ekonomi, yang mana hal ini menjadi faktor utama dalam menghambat keberlanjutan pendidikan. Hal ini diperjelas dengan pendapat penduduk sekitar yang masuk ke dalam kelas sosial menengah ke bawah.

Faktor berikutnya adalah aksesibilitas yang harus ditempuh untuk mencapai tempat belajar yang masih kurang memadai dan dengan jarak yang cukup jauh, sehingga beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam hal ini. serta, motivasi yang kurang intensif diberikan. Kebanyakan orangtua/wali yang mengalami kendala ekonomi meminta anak-anaknya berhenti sekolah untuk bekerja, atau menikah. Hal ini masih kerap terjadi karena kurangnya motivasi dan



## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

---

pengetahuan berlanjut mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil di atas, perlu adanya evaluasi menyeluruh mengenai implementasi program wajib belajar 9 Tahun, agar dapat dipastikan bahwa program tersebut dapat dilaksanakan dengan merata dan memberikan dampak positif yang signifikan untuk masyarakat setempat, terutama dalam hal peningkatan akses pendidikan dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

### **KESIMPULAN**

Pada praktiknya, program ini dapat meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dengan memperpanjang kewajiban belajar hingga 9 tahun, sehingga lebih banyak anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal. Program ini juga membantu menekan angka putus sekolah, yang pada gilirannya dapat membawa dampak positif terhadap tingkat literasi dan kemampuan berfikir masyarakat. Meskipun konsepnya positif, penerapan program ini seringkali dihadapkan dengan berbagai macam tantangan pada praktiknya, seperti kurangnya infrastruktur pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik yang kurang memadai, dan kendala finansial bagi keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Hal ini menyebabkan Sebagian peserta didik mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan.

Kesuksesan program wajib belajar 9 tahun sangat bergantung pada dukungan dan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan orangtua untuk memastikan bahwa setiap anak dapat mengakses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang baik. Meskipun demikian dampak dari penerapan program wajib belajar 9 tahun ini tidak segera terlihat, hal ini tetap diyakini memiliki dampak jangka panjang yang positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan motivasi dan pengetahuan mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta peningkatan aksesibilitas, dan dukungan ekonomi bagi siswa yang membutuhkan.



## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

---

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Razak, and Satria Wiguna. “Pengaruh Beasiswa Pendidikan Pada Program Indonesia Pintar (PIP) Terhadap Minat Belajar Aqidah Akhlak.” *Tut Wuri Handayani : Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 3 (2023): 103–108.
- Abidin, Zainal, Tobibatussa’adah, and Abdul Mujib. “Praktek Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Pada.” *Ri’ayah* 7, no. 02 (2022): 188–212. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/5836/2962>.
- Adhitya Wardhana, Bayu Kharisma. “Pendidikan , Dimana Program Pendidikan Yang Dijadikan Salah Satu Prioritas Di Indonesia Adalah Berdasarkan Jenjang Pendidikan . Apabila Melihat Perkembangan Tamatan Pendidikan Usia 15 Tahun Ke Belajar Umumnya Belum Mampu Untuk Dipenuhi Oleh Beberapa Provi” 12, no. 04 (2023): 742–751.
- Ali, M.Makhrus, Tri Hariyati, Meli Yudestia Pratiwi, and Siti Afifah. “Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapannya Dalam Penelitian.” *Education Journal* 2, no. 2 (2022): 1–6.
- Arisman Sabir, Aldino, Elvima Nofrianni. “Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun Di Desa Desa Datar Kecamatan Muko-Muko Bathin Vii.” *Ilmiah, Jurnal Pendidikan, Wahana* 9, no. 20 (2023): 409–416.
- Bashori, Bashori, and Septi Gia Aprima. “Analisis Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi Lampung.” *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2019): 18–28.
- Beatty, Amanda, Emilie Berkhout, Luhur Bima, Menno Pradhan, and Daniel Suryadarma. “Schooling Progress, Learning Reversal: Indonesia’s Learning Profiles between 2000 and 2014.” *International Journal of Educational Development* 85 (2021): 102436. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059321000894>.
- Berliana, R, and R D A Putra. “Pengaruh Wajib Belajar Sembilan Tahun Terhadap Pendapatan: Studi Kasus Indonesia.” *HIMIE Economics Research and ...* (2022).



## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

---

- Ciptullah, Sandi, Valda Putri Loppies, and Wildan Pratama Putra. “Pengaruh Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Terhadap Pendapatan Di Pulau Jawa” (2022).
- Dariyanto, D, S Suharjuddin, and A W Awiria. “Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pedagogik Guru Melalui Penelitian Tindakan Kelas Di SDN Teluk Pucung I Kota Bekasi.” *Jurnal IPMAS* 1, no. 2 (2021): 59–66. [http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/11761%0Ahttp://repository.ubharajaya.ac.id/11761/1/JURNAL ABDIMAS PTK JIPMAS 2021 %281%29.pdf](http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/11761%0Ahttp://repository.ubharajaya.ac.id/11761/1/JURNAL%20ABDIMAS%20PTK%20JIPMAS%202021%281%29.pdf).
- Darmalaksana, Wahyudin. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan.” *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020): 1–6.
- Fismanelly, Fismanelly, Herman Herman, and Syahril Syahril. “Efektivitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Permata Bunda Sebagai Lembaga Pendidikan Nonformal Dalam Upaya Pengentasan Wajib Belajar Sembilan Tahun.” *Tarikhuna: Journal of History and History Education* 4, no. 1 (2022): 91–103.
- Hardiasanti, Maulidia, and Syunu Trihantoyo. “Implementasi Wajib Belajar Di Daerah Terdepan, Terluar Dan Tertinggal.” *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* 09, no. 05 (2021): 1064–1077.
- Iis Margiyanti, and Siti Tiara Maulia. “Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun.” *Jurnal Pendidikan dan Sastra Inggris* 3, no. 1 (2023): 199–208.
- Ilyas, A A. “Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mewujudkan Wajib Belajar 9 Tahun (Studi Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka).” *Jambura Journal of Administration and Public Service* 3, no. April (2023). <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjaps/article/download/19441/6364>.
- Jaya, I.M.L.M. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia. Anak Hebat Indonesia, 2020.



## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

---

- Kataoka, Mitsuhiko. "Interprovincial Differences in Labour Force Distribution and Utilization Based on Educational Attainment in Indonesia, 2002–2015." *Regional Science Policy & Practice* 11, no. 1 (2019): 39–55. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1757780223003360>.
- Lestari, Atun, Farid Setiawan, and Eviana Agustin. "Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar." *Arzusin* 2, no. 6 (2022): 602–610.
- Lewis, Blane D, and Hieu T M Nguyen. "Assessing the Causal Impact of Compulsory Schooling Policy in Indonesia." *International Journal of Educational Research* 104 (2020): 101693. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035520317997>.
- Loke, Alice Yuen, Chunlan Guo, and Alex Molassiotis. "Development of Disaster Nursing Education and Training Programs in the Past 20 Years (2000–2019): A Systematic Review." *Nurse Education Today* 99 (2021): 104809. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691721000666>.
- Lukman, Irwan. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Ternate Dalam Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun." *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8, no. 4 (2019): 339–345.
- Mahmud Hidayat, Khoiron, Retno Wulan Sekarsari. "EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR WAJIB BELAJAR 9 TAHUN STUDI KASUS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG" 17, no. 8 (2023): 47–57.
- Mubin, Fatkhul. "Perencanaan Penuntasan Wajib Belajar Dan Peningkatan Mutu Pendidikan" 3 (2020): 268–279.
- Napida, Lidia, Ummi Kalsum, Dwi Noviani, and Zainuddin Zainuddin. "Perkembangan Pendidikan Di Belanda." *Jurnal Yudistira: Publikasi Riset Ilmu Pendidikan dan Bahasa* 2, no. 1 (2024): 20–27.
- Nugroho, Anda, Hidayat Amir, Irsyan Maududy, and Irma Marlina. "Poverty Eradication Programs in Indonesia: Progress, Challenges and Reforms." *Journal of Policy Modeling* 43, no. 6 (2021): 1204–1224. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161893821000661>.



## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

---

- Putri Paradiba, Nadila, Siti Salwa Maulidina, Dias Eka Ismawanto, Silvia Hendrika Putri, Gio Wiratama, Nia Afrianti, Arzaina Midriyan, Findi Aprianto, Cecep Wahyudin, and Euis Salbiah. “Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Sosialisasi Wajib Belajar 9 Tahun.” *Karimah Tauhid* 2, no. 5 (2023): 1959–1966. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/10545>.
- Rolos, Meysi Christi, Johny H. Posumah, and Very Y. Londa. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Minahasa Tenggara.” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* VIII, no. 113 (2022): 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/38156/34866>.
- Rupinus, Arifin, Tora Akadira. “VOX EDUKASI : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN” 14 (2023): 301–310.
- Sa’adiyyah, Ade Millatus, and Siti Kulsum. “Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Dalam Mengimplementasikan Program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun Untuk Memenuhi Hak Belajar Anak.” *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 4, no. 1 (2021): 20–33.
- Sari, Dwi Wulan, and Qolbi Khoiri. “Pendidikan Untuk Semua: Studi Pada Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun.” *Journal on Education* 5, no. 3 (2023): 9441–9450.
- Sari, Evi Catur. “Kurikulum Di Indonesia: Tinjauan Perkembangan Kurikulum Pendidikan.” *Inculco Journal of Christian Education* 2, no. 2 (2022): 93–109.
- Sofa, Ade, Iga Mawarni, and Asra’i Maros. “Implementasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Bagi Suku Anak Dalam.” *Administraus* 7, no. 1 (2023): 31–42.
- Sofyan, Fitri Silvia, and Aris Riswandi Sanusi. “Pentingnya Wajar Dikdas 12 Tahun Untuk Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2022.” *Jurnal UBP Karawang* (2023): 2411–2420.



## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

P-ISSN: 2338:6673; E-ISSN 2442:8280

Vol. 12. No. 01. Februari, 2024, Hal: 83-105

---

- Sukmawati, A S, F Sabur, M Nur, A R Darmawan, S Sa'dianoor, K Mahbub, I Irmawati, S Silviana, M R Tawil, and C B K Sampurno. *BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=vrrIEAAAQBAJ>.
- Tabun, Marthen. "Analisis Kebijakan Tentang Sd-Smp Negeri Satu Atap Dan Aplikasinya Dalam Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Kupang." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 6, no. 4 (2023): 3152–3159. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/22549>.
- Tahun, Wajib Belajar, and Mahmud Hidayat. "EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR WAJIB BELAJAR 9 TAHUN Studi" (2023).
- Tambunan, Ahmad Taufiq, Erika Revida, and Rujiman Rujiman. "Partisipasi Pemuda Dalam Meningkatkan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Bagi Masyarakat Kelurahan Denai Kota Medan." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 8, no. 1 (2020): 39.
- . "Partisipasi Pemuda Dalam Meningkatkan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Bagi Masyarakat Kelurahan Denai Kota Medan." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 8, no. 1 (2020): 39–63.
- Wahyudi, Sigit. "Peranan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dalam Upaya Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun Di Mts Nw Teros Tahun Anggaran 2019/2020." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7 (2021): 1–21.
- Wicaksono, Andri, and Yulia Siska. "Wajib Belajar 12 Tahun Rekomendasi Kebijakan Menengah Universal (PMU)." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang* (2020): 846.
- Zidane, Rikmanen, Rahmat Hidayat, and Rudyk Nababan. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KABUPATEN BOGOR (Studi Kasus Kecamatan Cibinong Dan Kecamatan Sukamakmur)." *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 9, no. 1 (2021): 37–47.